

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i-ii
I PENJELASAN UMUM	1
A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA	1
B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	1
C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA	2
D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR CINDE WILIS	2
E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA	2
II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	4
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	5
B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	6
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	6
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	7
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	7
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	8
E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	9
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	9
H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	10
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	10
I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	10
J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	11
K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	11
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN	11
M. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I **PENJELASAN UMUM**

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan Publikasi PT. BPR Cinde Wilis posisi 31 Desember 2022 dapat diinformasikan bahwa total aset BPR adalah Rp 523.523.616.222, sedangkan modal inti BPR adalah Rp 42.094.992.413. Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan *corporate governance*, PT. BPR Cinde Wilis mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *corporate governance* sebagai berikut:

- a. UU No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. UU No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. POJK No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- g. POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- h. POJK No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. POJK No.23/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- j. POJK No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. POJK No.14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
- n. SEOJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
- o. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. SEOJK No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- q. SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.

- r. Anggaran dasar PT. BPR Cinde Wilis beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR CINDE WILIS

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. *Independency* (Independensi)

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. *Fairness* (Kewajaran)

BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Cinde Wilis juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Cinde Wilis sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Lucia Primastuti Rahayu, SE
	NIK : 3509114402740002
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional harian Kantor Pusat, yaitu dengan menjalankan fungsi koordinasi antara Direktur Utama dengan seluruh Direktur dan fungsi pengawasan/pengendalian, fungsi pengarahan, fungsi koordinasi, fungsi konsultasi dan fungsi kolegal terhadap seluruh Biro di Kantor Pusat.
2.	Nama : Bibin Hendra Nusarofa, SE
	NIK : 3509202811740002
	Jabatan : Direktur Kredit
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan aspek perkreditan oleh Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka penyaluran dan monitoring kredit agar dihasilkan kualitas kredit yang sehat dan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran kredit.
3.	Nama : Anang Erfantoro, A.Md
	NIK : 3509191909670003
	Jabatan : Direktur Pemasaran
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran Kredit dan Simpanan bersama Biro Pemasaran untuk mencapai target penjualan dan mengembangkan secara efektif dan efisien.
4.	Nama : Sunarwati, SE
	NIK : 3509195511700007
	Jabatan : Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan operasional Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank serta peraturan-peraturan pemerintah dan OJK.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. 4. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan <i>digital banking</i> dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 5. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat <i>human error</i> agar di evaluasi dan di mitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. 6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. 7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Paulino Krisnawahjuesa, MBA
	NIK : 3578092811740001
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.
2.	Nama : Yudinata Tjipto Santoso, SE
	NIK : 3509200305750002
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.
3.	Nama : Haudinata Tjipto Santoso, ST
	NIK : 3578212208720001
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya

	yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.
4.	Nama : Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc
	NIK : 3509211103490001
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.
Rekomendasi kepada Direksi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Direksi mengupayakan terus menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan mempertahankan tingkat kesehatan nominatif terutama pada masa akhir program relaksasi kredit Covid-19. 2. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan <i>digital banking</i> dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan dapat dipercaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pembinaan dan pelatihan yang tepat. 4. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 5. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat <i>human error</i> agar di evaluasi dan di mitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. 6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi. 7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis. 	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.							
Dst.							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Lucia Primastuti Rahayu, SE	3509114402740002	0	0
2.	Bibin Hendra Nusarofa, SE	3509202811740002	0	0
3.	Anang Erfantoro, A.Md	3509191909670003	0	0
4.	Sunarwati, SE	3509195511700007	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NIHIL				

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lucia Primastuti Rahayu, SE	3509114402740002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bibin Hendra Nusarofa, SE	3509202811740002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Anang Erfantoro, A.Md	3509191909670003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Sunarwati, SE	3509195511700007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lucia Primastuti Rahayu, SE	3509114402740002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bibin Hendra Nusarofa, SE	3509202811740002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Anang Erfantoro, A.Md	3509191909670003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Sunarwati, SE	3509195511700007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	3578092811740001	3.390.000.000	30,00
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	3509200305750002	2.825.000.000	25,00
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	3578212208720001	2.825.000.000	25,00
4.	Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc	3509211103490001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NIHIL				

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	3578092811740001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	3509200305750002	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Ada hubungan	Tidak ada	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Ada hubungan
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	3578212208720001	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Ada hubungan	Tidak ada	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Ada hubungan
4.	Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc	3509211103490001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	3578092811740001	Tidak ada	Tidak ada	Oferi Kresnawahjuesa, M.Sc,Ph.D-Saudara Kandung, Vinolia-Orang Tua Kandung
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	3509200305750002	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Saudara Kandung	Tidak ada	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Saudara Kandung
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	3578212208720001	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Saudara Kandung	Tidak ada	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Saudara Kandung
4.	Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc	3509211103490001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	4	1.173.600.354	4	1.427.100.000
2.	Tunjangan	-	-	-	-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	4	423.345.964	4	1.363.356.008
Total			1.596.946.318		2.790.456.008

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,1	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,58	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,01	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,00	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,56	:	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	21 Maret 2022	4	Struktur Organisasi BPR dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pejabat.
2.	31 Mei 2022	4	Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pejabat, revisi target, pemulihan kebijakan insentif & lembur karyawan dan jaringan kantor.
3.	6 Juli 2022	4	Revisi target pelepasan Semester II tahun 2022.
4.	1 November 2022	4	Ketentuan NOA, dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pejabat pemutus.
5.	22 November 2022	4	Penyesuaian suku bunga Deposito, penyesuaian suku bunga Tabungan, pra budget (target pelepasan kredit) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Direksi.
6.	29 November 2022	4	Persiapan Rencana Bisnis BPR tahun 2023.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	3578092811740001	6	0	100,00
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	3509200305750002	6	0	100,00
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	3578212208720001	6	0	100,00
4.	Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc	3509211103490001	6	0	100,00

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	34	-
Dalam Proses Penyelesaian	6	-
Total	40	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	NIHIL								

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	18 - 25 April 2022	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di seluruh kantor Cabang BPR Wilis.	Masyarakat kurang mampu di sekitar Kantor BPR Wilis.	23.830.000
2.	15 - 21 Desember 2022	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang yang meliputi Jember, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi dan Bondowoso.	Masyarakat yang membutuhkan.	15.000.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis. Melalui laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan *stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan laporan ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis.

Jember, 30 Januari 2023

Persetujuan Pengurus PT. BPR Cinde Wilis



Paulino Krisnawahjuesa, MBA
Komisaris Utama



Lucia Primastuti Rahayu, SE
Direktur Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Cinde Wilis

Posisi : Tahun 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,68	Sangat Baik
Analisis	
<p>PT. BPR Cinde Wilis telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Cinde Wilis.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.	

Jember, 30 Januari 2023

Persetujuan Pengurus PT. BPR Cinde Wilis



Paulino Krisnawahjuesa, MBA
Komisaris Utama



Lucia Primastuti Rahayu, SE
Direktur Utama

LAMPIRAN

TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR CINDE WILIS
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,58	0,65	0,18	1,41	0,283
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (12.5%)	0,89	0,75	0,20	1,84	0,230
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (2.5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	0,90	0,80	0,20	1,90	0,190
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	0,80	0,50	0,20	1,50	0,150
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,40	0,10	1,50	0,038
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,00	0,86	0,20	2,06	0,206
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,10	1,90	0,143
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	0,80	0,10	1,90	0,143
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	0,50	0,70	0,10	1,30	0,098
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						1,68

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sangat Baik

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		5	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,17					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,58					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X				Telah sesuai SEOJK No.5/SEOJK.03/2016.
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X				Telah sesuai POJK No.62/POJK.03/2020.
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	10	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		13					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		1,63					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,65					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	X					Telah sesuai POJK No.62/POJK.03/2020.
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		1,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,18					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,41
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,28

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	X					Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampai jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	X					Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	X					Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat		X				Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum	X					Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi				X		Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen		X				Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4	8	0	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		1,78					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,89					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		X				Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Teloh sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan		X				Teloh sesuai POJK

	operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan						No.4/POJK.03/2015.
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris	X					Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	14	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		1,88					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,75					
C							
HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,84
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,23

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,00

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,00
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,20

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	X					Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		X				Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	X					Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan			X			Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	4	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		1,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,90					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		X				Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		X				Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	10	0	0	0	



TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		X			Telah sesuai SEOJK No.1/SEOJK.03/2019.	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		X			Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.	
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,90
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,19

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	X					Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016.
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016.
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)		X				Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016.
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	X					Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern		X				Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015 dan POJK No.47/POJK.03/2017 serta SEOJK No.6/SEOJK.03/2016, BPR tidak memiliki program rekrutmen PE Audit Intern, namun penunjukan PE Audit Intern telah melalui assessment dan persetujuan dari Direktur Utama serta telah mendapatkan saran dan rekom dari Komisaris.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		1,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,80					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	X					Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016.
2	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		X				Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	X					Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016.
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan	X					Telah sesuai POJK No.47/POJK.03/2017

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				Surat Perjanjian Kerja Audit Laporan Keuangan antara BPR Wilis dan KAP Soebandi dan Rekan No.09/SBD-SPK/X/2022 dan surat Penunjukan KAP berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 7 Oktober 2022.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	X					Keputusan RUPSLB tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan AP Soebandi dan KAP Soebandi & Rekan serta usulan Dewan Komisaris tanggal 6 Oktober 2022.
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	X					Telah sesuai SEOJK No.36/SEOJK.03/2017.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,40					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	X					Telah sesuai SEOJK No.36/SEOJK.03/2017.
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Telah sesuai SEOJK No.36/SEOJK.03/2017.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN		1,00					



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

(H): 2		
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,10	

PENJUMLAHAN S+P+H	1,50
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,04

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko		X				SK Direksi No.194/X/SK/KP.DIR-00/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK No.13/POJK.03/2015 dan POJK No.4/POJK.03/2015.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko		X				Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko No.114a/VI/SK/KP.DIR-00/2019 tanggal 14 Juni 2019 sesuai POJK No.13/POJK.03/2015.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan		X				Belum memiliki kebijakan namun setiap akan menerbitkan produk atau aktivitas baru selalu disertai dengan SK Direksi.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		X				Telah memiliki namun masih memerlukan penyempurnaan.
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X				Telah memiliki namun masih memerlukan penyempurnaan.
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material			X			Sudah melakukan namun masih perlu perbaikan.
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh		X				BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh, hal ini telah dibuktikan dengan pemenuhan struktur dan infrastruktur Manajemen Risiko yaitu penunjukkan PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan (SK Direksi

							No.194/X/SK/KP.DIR-00/2018), pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko (SK No.114a/VI/SK/KP.DIR-00/2019).
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sudah menerapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		X				Sudah menggunakan aplikasi yang mendukung penerapan manajemen risiko.
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		X				Sudah dilakukan namun harus tetap terus diingatkan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	12	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,14					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,86					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Untuk laporan produk dan aktivitas baru dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,06
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,21

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				Kebijakan dan Prosedur BMPK masih terpisah dan kebijakan kredit masih akan disempurnakan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				Pengkinian akan disesuaikan mengikuti ketentuan yang berlaku.
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		X				Seluruh proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Telah sesuai dengan ketentuan dan sudah dilaporkan BMPK pada Labul setiap bulannya.
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi pelanggaran maupun pelanggaran BMPK.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

PENJUMLAHAN S+P+H	1,90
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,14

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR		X				Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai POJK No.15/POJK.03/2021.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				RBB sudah menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				BPR tidak melakukan penambahan modal disetor karena telah sesuai ketentuan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X				Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal untuk menjaga kelangsungan usaha BPR.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB, hal ini dibuktikan dengan penyusunan Laporan Pengawasan Dekom yang telah dilaporkan pada bulan Januari 2023.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

C							HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	x										RBB telah disusun dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN							1	0	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN							1						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1							1,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%							0,10						

PENJUMLAHAN S+P+H											1,90
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO											0,14

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2022|R

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	X					CBS BPR telah memadai dan menghasilkan laporan yang lengkap, utuh dan akurat.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Laporan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK.
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Opini dari KAP tahun 2021 tanggal 28 Februari 2022, Laporan Tahunan posisi tahun 2021 yang dilaporkan tahun 2022 tanggal 26 April 2022.
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah melaksanakan transparansi informasi produk sesuai ketentuan OJK melalui web dan IG.
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Laporan sudah disusun dan disajikan sesuai dengan tata cara dan ketentuan OJK.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,75					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,70					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai	X					Sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK.



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	X					BPR telah menyampaikan laporan pengaduan secara tepat waktu.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,30
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,10

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Cinde Wilis

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

504920-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600969-31012023184757

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

tyas.saraswati@bprwilis.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 18:47:57



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.